

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Mengenai *Habit of Mind*

1. Definisi *Habit of Mind*

Habit of Mind merupakan kebiasaan berpikir yang digunakan individu ketika menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara langsung. Menurut Costa & Kallick, (2009), *Habit of Mind* adalah perilaku intelektual yang dilakukan secara konsisten dan bijaksana dalam situasi problematik. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh bagaimana ia menggunakan pengetahuannya secara efektif dalam situasi nyata. Oleh karena itu, *Habit of Mind* mencakup kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif. Dalam dunia pendidikan, *Habit of Mind* menjadi dasar penting dalam membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills), sehingga peserta didik mampu bertindak secara rasional dan bertanggung jawab (Marzano, 1992). Pada dasarnya, *Habit of Mind* berkaitan dengan keiasaan seseorang dalam berpikir secara terarah dan rasional. Kebiasaan ini dapat terlihat dari sikap individu ketika menghadapi kesulitan, seperti tidak mudah menyerah, mampu mengendalikan diri, sebelum mengambil keputusan. Selain itu, *Habit of Mind* juga berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Individu yang memiliki *Habit of Mind* yang baik cenderung lebih mampu memahami masalah dari berbagai sudut pandang dan tidak terburu-buru dalam bertindak (Costa & Kallick, 2009)

Dalam dunia pendidikan, *Habit of Mind* memiliki peran yang penting karena dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Menurut Marzano, (1992), kemampuan berpikir tingkat tinggi diperlukan agar peserta didik tidak hanya mampu menghafal materi pembelajaran, tetapi juga dapat menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara efektif. Oleh karena itu, proses pembelajaran di sekolah seharusnya tidak hanya

berokus pada pencapaian nilai akademik, melainkan juga pada pembentukan pola pikir peserta didik agar mampu berpikir secara kritis dan bertanggung jawab. Penerapan *Habit of Mind* dalam proses pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang mendorong peserta didik untuk aktif berpikir, seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, presentasi, maupun kegiatan refleksi. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat belajar menyampaikan pendapat, menghargai pandangan orang lain, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kebiasaan sederhana seperti berpikir sebelum bertindak, berani mencoba, dan mau belajar dari kesalahan juga menjadi bagian penting dalam pembentukan *Habit of Mind* (Costa & Kallick, 2009). Di era perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kemampuan berpikir yang baik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi peserta didik. Banyaknya informasi yang diterima setiap hari menuntut seseorang untuk mampu memilah informasi, memahami situasi, dan mengambil keputusan secara bijaksana. Oleh sebab itu, *Habit of Mind* perlu dikembangkan sejak dini agar peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir yang matang, sikap tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan (Marzano, 1992).

2. Macam – macam *Habit of Mind* / Kebiasaan berpikir

Menurut Costa & Kallick, (2009), terdapat 16 indikator *Habit of Mind* yaitu: *persisting, managing impulsivity, listening with understanding and empathy, thinking flexibly, metacognition, striving for accuracy, questioning and posing problems, applying past knowledge, thinking and communicating with clarity, gathering data through all senses, creating and innovating, responding with wonderment, taking responsible risks, finding humor, thinking interdependently, dan continuous learning*. Keenam belas indikator ini membentuk pola pikir yang produktif dan adaptif. Dalam praktik pendidikan, indikator tersebut dapat dikembangkan melalui pembelajaran aktif, diskusi, refleksi, dan pembiasaan di lingkungan sekolah.

Indikator pertama yaitu tekun. Sikap ini menunjukkan kemampuan peserta didik untuk tetap berusaha menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan. Peserta didik yang memiliki ketekunan tidak mudah menyerah dan mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Kedua, *managing impulsivity* atau mengendalikan *impulsif*, yaitu kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak sehingga peserta didik dapat mengambil keputusan secara lebih bijaksana dan tidak tergesa-gesa.

Ketiga, *listening with understanding and empathy* merupakan kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian serta memahami pendapat orang lain. Keempat, *thinking flexibly* atau berpikir *fleksibel*, yaitu kemampuan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang sehingga peserta didik mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan maupun perbedaan pendapat.

Kelima, *metacognition* atau kesadaran berpikir, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan mengontrol proses berpikirnya sendiri. Peserta didik yang memiliki kesadaran berpikir biasanya lebih mampu mengevaluasi tindakan dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Keenam, *striving for accuracy* berarti berusaha mencapai hasil yang tepat dan maksimal. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas secara teliti dan sungguh-sungguh.

Ketujuh, *questioning and posing problems* merupakan kemampuan bertanya dan mengemukakan masalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Kedelapan, *applying past knowledge to new situations* yaitu kemampuan menggunakan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya untuk menghadapi situasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik mampu belajar dari pengalaman dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kesembilan, *thinking and communicating with clarity and precision* adalah kemampuan berpikir dan menyampaikan pendapat secara jelas serta tepat. Kesepuluh, *gathering data through all senses* berarti memanfaatkan seluruh indera dalam memperoleh informasi sehingga peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Indikator berikutnya yaitu *creating, imagining, and innovating* yang menunjukkan kemampuan menciptakan ide-ide baru dan berpikir kreatif. Sikap ini penting agar peserta didik mampu menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan. Selanjutnya, *responding with wonderment and awe* merupakan sikap antusias dan rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru sehingga peserta didik memiliki semangat belajar yang tinggi.

Indikator ketiga belas yaitu *taking responsible risks* atau berani mengambil risiko secara bertanggung jawab. Peserta didik tidak takut mencoba hal baru, tetapi tetap mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Keempat belas, *finding humor* yaitu kemampuan menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan tanpa merugikan orang lain.

Selanjutnya, *thinking interdependently* merupakan kemampuan bekerja sama dan berpikir bersama orang lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Sikap ini penting untuk membangun rasa tanggung jawab sosial serta kemampuan berkolaborasi. Terakhir, *remaining open to continuous learning* yaitu memiliki kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Peserta didik yang memiliki sikap ini menyadari bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat.

Keenam belas indikator *Habit of Mind* tersebut saling berkaitan dalam membentuk kebiasaan berpikir dan bertindak yang positif. Dalam praktik pendidikan, indikator-indikator tersebut dapat dikembangkan melalui budaya sekolah dan proses pembelajaran yang mendukung keaktifan peserta didik, seperti diskusi, kerja kelompok, refleksi, pembiasaan disiplin, serta pemberian tanggung jawab dalam kegiatan sekolah. Dengan adanya pembiasaan tersebut, peserta didik diharapkan mampu memiliki pola pikir yang lebih matang, bertanggung jawab, dan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

3. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya *Habit of Mind*

a) Faktor Internal

Faktor internal meliputi motivasi, minat, kemampuan kognitif, dan kesadaran metakognitif peserta didik. Faktor ini menentukan

bagaimana individu memahami dan merespons suatu masalah (Marzano, 1992).

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup lingkungan sekolah, peran guru, strategi pembelajaran, serta budaya sekolah. Guru berperan penting dalam menanamkan *Habit of Mind* melalui keteladanan dan pembiasaan (Costa & Kallick, 2009).

c) Faktor Pembiasaan

Pembiasaan merupakan faktor utama dalam pembentukan *Habit of Mind*. Kebiasaan berpikir terbentuk melalui latihan yang konsisten dan berulang dalam kehidupan sehari-hari (Lickona, 2012).

B. Kajian Mengenai Budaya Sekolah

1. Definisi Budaya

Menurut (Furkan, 2024, hlm. 24) Budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai dan hasilnya yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Kultur juga dapat dilihat sebagai suatu perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan, sekaligus cara untuk memandang persoalan dan memecahkannya. Oleh karena itu, suatu kultur secara alami diwariskan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Definisi budaya juga disampaikan oleh Geertz, mempresentasikan sebuah pola makna yang diturunkan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol. Simbol-simbol ini terdiri dari pesan-pesan tertulis (*eksplisit*) dan tersembunyi (*implisit*) yang dikodengan dalam Bahasa. Budaya memiliki elemen – elemen penting seperti norma, nilai, kepercayaan, tradisi, ritual, seremoni/upacara dan mitos yang diterjemahkan oleh sekelompok orang. Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu diwujudkan dalam perilaku dalam interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan

menghasilkan sistem social, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Budaya tersusun dari makna-makna dan praktik-praktik orang-orang biasa. Kebudayaan adalah pengalaman dalam hidup sehari-hari berbagai teks, praktik dan makna semua orang dalam menjalani hidup mereka. Makna dan praktik-praktik tersebut dijalani tidak dalam medan yang kita ciptakan sendiri, meski kita berjuang untuk membentuk secara kreatif pada kehidupan kita. Kebudayaan tidak melayang-layang bebas dari ikatan kondisi-kondisi material hidup. Sebaliknya, apapun tujuan dari suatu praktik kultural, tak diragukan lagi sarana produksinya selalu bersifat material.

2. Definisi Budaya Sekolah

Dalam buku yang berjudul Pendidikan karakter melalui budaya sekolah oleh Dr. Nuril Furkan Budaya Sekolah merupakan nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk *stakeholders* pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh warga sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, slogan-slogan atau motto, kebiasaan – kebiasaan, produk-produk baik materi maupun in-materi, dan upacara-upacara yang telah dikembangkan dalam waktu yang lama dan dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan diturunkan kepada generasi baru sebagai pegangan untuk mengelola dan menghadapi berbagai persoalan dalam perjalanan sekolah (Zamroni, 2011, hlm. 226 dalam Furkan, 2024). Budaya sekolah merupakan budaya organisasi dalam konteks persekolahan. Budaya sekolah sebagai kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan *spirit* dan nilai yang dianut sekolah, yakni dalam bentuk bagaimana warga sekolah seperti komite sekolah, yayasan (untuk swasta), kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa bekerja, belajar, dan berhubungan satu sama lain. Kultur sekolah merupakan faktor yang esensial dalam membentuk siswa menjadi manusia optimis, berani tampil, berperilaku kooperatif serta memiliki kecakapan

personal dan akademik (Hakiki Mahfuzh, 2010, hlm.1 dalam Furkan, 2024).

Budaya sekolah merupakan kebiasaan dan tradisi sekolah yang tumbuh dan dikembangkan berdasarkan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah sesuai kesepakatan bersama seluruh warga sekolah. Kebiasaan dan tradisi tersebut mewarnai suasana kehidupan sekolah yang ditunjukkan oleh seluruh warga sekolah, misalnya ketika masuk halaman sekolah memungut sampah, membersihkan ruang kelas, memasang hiasan dinding ruang kelas, membersihkan kamar kecil, mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas, perilaku kepala sekolah terhadap guru dan siswa. Kebiasaan tersebut merupakan bagian integral dalam budaya sekolah. Cakupan budaya sekolah sangat luas. Umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstra-kurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah.

Budaya sekolah juga dapat didefinisikan sebagai suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah. Aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah. Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah (Abdul Azis Wahab dkk., 2010, hlm. 19 dalam Furkan, 2024). Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah yang didalamnya terjadi interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, guru dengan guru dan tenaga kependidikan, tenaga kependidikan dengan sesamanya di mana terdapat kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial,

kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab yang dilandasi dan berpedoman aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah.

3. Unsur-Unsur Budaya Sekolah

Unsur – unsur budaya sekolah jika ditinjau dari usaha peningkatan kualitas pendidikan sebagai berikut:

1) Budaya sekolah yang positif

Budaya sekolah yang positif adalah kegiatan – kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, misalnya kerja sama dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap prestasi, dan komitmen terhadap belajar.

2) Budaya sekolah yang negatif

Budaya sekolah yang negative adalah kultur yang kontra terhadap peningkatan mutu pendidikan. Artinya resisten terhadap perubahan, misalnya siswa takut salah, siswa takut bertanya, dan siswa jarang melakukan kerja sama dalam memecahkan masalah.

3) Budaya sekolah yang netral

Budaya sekolah netral yaitu budaya yang tidak berfokus pada satu sisi namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini bisa berupa arisan keluarga sekolah, seragam guru, seragam siswa, dan lain-lain.

Hadley Beare (dalam Hakiki Mahfuzh, 2010, Furkan, 2024) mendeskripsikan unsur-unsur budaya sekolah dalam dua kategori, yakni unsur kasat mata dan unsur yang tidak kasat mata. Unsur kasat mata mempunyai makna kalau berkaitan atau mencerminkan apa yang tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata adalah filsafat atau pandangan dasar sekolah mengenai kenyataan yang luas, makna hidup atau yang dianggap penting dan harus diperjuangkan oleh sekolah. Hal itu harus dinyatakan secara konseptual dalam rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang lebih konkret yang akan dicapai oleh sekolah. Adapun unsur yang kasat mata dapat termanifestasi secara konseptual meliputi: 1) Visi, misi, tujuan dan

sasaran; 2) kurikulum; 3) Bahasa komunikasi; 4) narasi sekolah; 5) narasi tokoh; 6) struktur organisasi; 7) ritual atau upacara; 8) prosedur belajar mengajar; 9) peraturan sistem ganjaran/hukuman; 10) layanan psikologi sosial; 11) pola interaksi sekolah dengan orang tua, masyarakat,. Unsur yang materiil dapat berupa: fasilitas dan peralatan, artefak dan tanda kenangan serta pakaian seragam. Herminto, S, (2005, hlm.12) (dalam Furkan, 2024) mengidentifikasi budaya sekolah sebagai berikut :

- 1) Artefak. Artefak memiliki dua jenis yaitu a) artefak yang dapat diamati seperti: arsitektur, tata ruang, eksterior dan interior, kebiasaan dan rutinitas, peraturan-peraturan, ritus-ritus, simbol, logo, slogan, bendera, gambar-gambar, tanda-tanda, sopan santun, cara berpakaian; b) artefak yang tidak dapat diamati berupa norma-norma atau cara – cara tradisional berperilaku yang telah lama dimiliki kelompok.
- 2) Nilai-nilai keyakinan Nilai dan keyakinan yang ada di sekolah dan menjadi ciri utama sekolah misalnya: a) ungkapan rajin pangkal pandai, b) air beriak tanda tak dalam, dan berbagai penggambaran nilai dan keyakinan lain.

Menurut Depdiknas, (2003, hlm.7-8) (dalam Furkan, 2024) juga memberikan gambaran tentang budaya dalam dua lapis. Lapisan pertama: sebagai dapat diamati dan sebagian tidak dapat diamati seperti arsitektur, tata ruang, eksterior dan interior, kebiasaan dan rutinitas, peraturan-peraturan, cerita-cerita, upacara-upacara, ritus-ritus, simbol, logo, slogan, bendera, gambar-gambar, tanda-tanda, sopan santun, cara berpakaian, dan yang serupa dapat diamati langsung, dan hal-hal yang berada di balik yang tampak itu tidak kelihatan, tidak dapat dipahami segera. Lapisan pertama budaya berupa norma-norma kelompok atau cara tradisional berperilaku yang telah lama dimiliki kelompok umumnya sukar diubah dan biasa disebut *artefak*. Lapisan kedua: berupa nilai-nilai bersama yang dianut kelompok berhubungan dengan apa yang penting, yang baik, dan yang benar. Lapisan ini tidak dapat diamati karena letaknya di dalam kehidupan bersama. Lapisan kedua berintikan nilai-nilai dan keyakinan sangat sukar diubah dan memerlukan waktu untuk mengubahnya.

Elemen penting budaya sekolah adalah norma, keyakinan, tradisi, upacara keagamaan, seremoni, dan mitos yang diterjemahkan oleh sekelompok orang tertentu. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan – kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan warga sekolah secara terus menerus. Budaya sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 1) budaya yang dapat diamati, berupa konseptual yaitu struktur organisasi, kurikulum; *behavior* (perilaku) yaitu kegiatan material yaitu fasilitas dan perlengkapan; 2) budaya yang tidak dapat diamati berupa filosofi yaitu visi, misi, serta nilai-nilai; yaitu kualitas, efektivitas, keadilan, pemberdayaan dan kedisiplinan (Depdiknas, 2003, hlm.1 dalam Furkan, 2024).

4. Prinsip-Prinsip Mengembangkan Budaya Sekolah

Untuk membangun dan mengembangkan budaya sekolah, satuan pendidikan harus mengetahui dan memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan budaya sekolah sehingga tercipta budaya sekolah yang kondusif bagi pembentukan karakter peserta didik. Upaya pengembangan budaya sekolah, menurut Akhmad Sudrajat (2010) (dalam Furkan, 2024, hlm.1-3) mengacu kepada beberapa prinsip berikut, yaitu:

- 1) Berfokus pada visi, misi dan tujuan sekolah. Pengembangan budaya sekolah harus senantiasa sejalan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah adalah mengarahkan pengembangan budaya sekolah. Visi tentang keunggulan mutu, misalnya, harus disertai dengan program-program nyata mengenai penciptaan budaya sekolah.
- 2) Penciptaan komunikasi formal dan informal. Komunikasi merupakan dasar bagi koordinasi dalam sekolah, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan pentingnya budaya sekolah. Komunikasi informal sama pentingnya dengan komunikasi formal. Dengan demikian kedua jalur komunikasi tersebut perlu digunakan dalam menyampaikan pesan secara efektif dan efisien.
- 3) Inovatif dan bersedia mengambil resiko. Salah satu dimensi budaya organisasi adalah inovasi dan kesediaan mengambil risiko. Setiap perubahan budaya sekolah menyebabkan adanya risiko yang harus

diterima, khususnya bagi para pembaru. Ketakutan akan risiko menyebabkan kurang beraninya seorang pemimpin mengambil sikap dan keputusan dalam waktu cepat.

- 4) Memiliki strategi yang jelas. Pengembangan budaya sekolah perlu ditopang oleh strategi dan program/ Strategi mencakup cara-cara yang ditempuh sedangkan program menyangkut kegiatan operasional yang perlu dilakukan. Strategi dan program merupakan dua hal yang selalu berkaitan.
- 5) Bebrorientasi kinerja. Pengembangan budaya sekolah perlu diarahkan

5. Peranan Budaya Sekolah

Berdasarkan buku Furkan, (2024, hlm. 37) Karakteristik peran budaya sekolah berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga yakni :

1) Bernilai strategis

Adalah budaya yang dapat berimbas dalam kehidupan sekolah secara dinamis. Misalnya memberi peluang pada warga sekolah untuk bekerja secara efisien. Disiplin dan tertib. Budaya sekolah merupakan milik kolektif bukan milik perorangan, sehingga budaya sekolah dapat dikembangkan dan dilakukan oleh semua warga sekolah.

2) Memiliki daya ungkit

Budaya yang memiliki daya gerak akan mendorong semua warga sekolah untuk berprestasi, sehingga kerja guru dan semangat belajar siswa akan tumbuh bila dipacu dan didorong dengan dukungan budaya yang memiliki daya ungkit yang tinggi. Misalnya kinerja sekolah dapat meningkat jika disertai dengan imbalan yang pantas. Penghargaan yang cukup, dan proporsi tugas yang seimbang. Begitu juga siswa akan meningkat semangat belajarnya, bila mereka diberi penghargaan yang memadai, pelayanan yang prima, serta didukung dengan sarana yang memadai.

3) Berpeluang sukses

Budaya yang berpeluang sukses adalah budaya yang memiliki daya ungkit dan memiliki daya gerak yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa keberhasilan dan rasa mampu untuk

melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya budaya gemar membaca. Budaya membaca di kalangan siswa dapat mendorong mereka untuk banyak tahu tentang berbagai macam persoalan yang mereka pelajari di lingkungan sekolah. Demikian juga bagi guru, mereka semakin banyak pengetahuan yang diperoleh, tingkat pemahaman semakin luas, semua ini dapat berlangsung jika disertai dengan kesadaran, bahwa mutu/kualitas akan menentukan keberhasilan seseorang.

6. Langkah pengembangan budaya sekolah

Budaya sekolah akan bermanfaat bagi sekolah jika dikembangkan sebagai spirit dalam penyelenggaraan pendidikan dan suasana kehidupan sekolah memberi ruang bagi warga sekolah untuk melakukan interaksi dengan baik. Untuk itu, sekolah perlu mengetahui hal-hal yang dapat dikembangkan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan budaya sekolah Furkan, (2024, hlm.40). Agar budaya sekolah bisa mengatur perilaku para anggota dalam mencapai tujuan organisasi, dalam pandangan Young Pai pada bukunya, perilaku tersebut dilandasi oleh nilai-nilai, norma-norma, aturan dan keyakinan yang sudah disepakati oleh anggota organisasi. Budaya sekolah menggambarkan suatu yang kompleks dari pola perilaku, hubungan interpersonal, sikap, penggunaan Bahasa, dan deskripsi-deskripsi dari tugas-tugas yang mencerminkan pandangan mendunia dari suatu kondisi atau fakta yang ada di masyarakat. Pengembangan budaya sekolah bisa gagal karena adanya budaya yang memusatkan perhatian ke dalam birokrasi. Disadari atau tidak, sistem sistem birokrasi yang kaku di sekolah dapat mempengaruhi kreativitas warga sekolah dalam mengembangkan sekolah, khususnya mengembangkan budaya sekolah. Sebab sekolah dihadapkan pada berbagai aturan dan harus melaksanakan aturan-aturan tersebut sebagai perpanjangan tangan dari sistem birokrasi pemerintahan. Padahal aturan-aturan tersebut belum tentu memberikan manfaat bagi sekolah dan tidak sesuai pula dengan kondisi sekolah.

Strategi pengembangan budaya sekolah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Memperhatikan *performance management system*, sistem yang mengatur dan mengarahkan pegawai. Hal ini dilakukan dengan merumuskan *key performance indicator* dan target yang diturunkan dari budaya baru;
- 2) Melalui skill (*hard and soft skill*). Artinya, pengembangan budaya sekolah harus memperhatikan sistem pengelolaan agar warga sekolah yang berperan di sana sesuai dengan tugas masing-masing dengan berpedoman pada indikator kunci kinerja.

Strategi pengembangan kultur sekolah menurut *savage* dan *Armstrong* adalah para kepala sekolah yang bermaksud mengubah kultur sekolah harus memahami kultur yang ada. Sebab pengembangan kultur sekolah sangat mempengaruhi hubungan warga sekolah sangat mempengaruhi hubungan warga sekolah sangat mempengaruhi hubungan warga sekolah. Di samping itu, mempelajari kultur yang lama juga penting dilakukan, karena sebagai masukan untuk persoalan di masa sekarang seperti keresahan sosial dan konflik kultur. Penggunaan budaya dan generalisasi ciri/sifat budaya sering membawa kepada keputusan individu dari kebudayaan lain yang salah. Kebudayaan mewakili suatu pola kebudayaan yang kompleks hubungan interpersonal, sikap, penggunaan Bahasa, dan definisi peran yang merefleksikan pandangan- pandangan khusus dari masyarakat tertentu .

Langkah-langkah pengembangan budaya sekolah yang kondusif dapat dilakukan dengan cara :

1. Identifikasi spirit atau nilai-nilai sebagai sumber budaya sekoah oleh pendidik, tenaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan (hasil identifikasi Kn diterapkan sebagai kebijakan resmi sekolah dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah);
2. Sosialisasi dan penyemaian nilai-nilai secara kontinu kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
3. Kepala sekolah harus selalu menumbuhkan komitmen warga sekolah dan pemangku kepentingan untuk memegang teguh nilai-nilai yang telah ditetapkan bersama. Pengembangan budaya sekolah ini akan

berhasil bila nilai-nilai sebagaimana termanifestasikan dalam berbagai kebijakan dan peraturan sekolah menjadi perilaku sosial sehari-hari di sekolah.

Membangun budaya sekolah dapat dilakukan melalui simbol dan tanda seperti yang diungkap Deal *et al.*, (1999:63) (dalam Furkan, 2024) bahwa simbol mewakili keyakinan dan nilai-nilai budaya yang tidak dapat dinyatakan secara jelas (abstrak). Simbol merupakan tempat berkumpul dari pesan-pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan. Simbol sebagai perwujudan dasar kita berdiri dan keinginan kita, memainkan peran yang sangat penting dalam kohesi dan kebanggaan budaya.

7. **Faktor yang mempengaruhi pengembangan budaya sekolah**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan budaya sekolah merupakan faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengembangan budaya sekolah di satuan Pendidikan. Menurut Furkan, (2024, hlm. 45) faktor-faktor tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan budaya sekolah yang berasal dari lingkungan sekolah di antaranya (a) kepala sekolah, (b) guru, (c) tenaga kependidikan, (d) peserta didik, (e) Visi sekolah, (f) program sekolah; (g) peraturan sekolah; dan (h) sarana prasarana pendidikan. Faktor internal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Walaupun jabatan sebagai kepala sekolah merupakan tugas tambahan guru, namun mengingat beratnya tugas merupakan tugas tersebut maka kepala sekolah diberikan keringanan untuk tidak mengajar sesuai beban mengajar guru minimal 24 jam dan maksimal 40 jam pelajaran per minggu. Kepala sekolah diberi jam mengajar (tatap muka di kelas) hanya 6 jam. Untuk memenuhi minimal 24 jam maka kegiatan sebagai kepala sekolah diekuivalen dengan 18 jam

pelajaran, sehingga kepala sekolah tetap memiliki jam mengajar minimal 24 jam pelajaran. Dengan keringanan jam tatap muka diharapkan kepala sekolah dapat memimpin sekolah dengan baik, untuk itu kepala sekolah harus memiliki kompetensi. Kompetensi kepala sekolah menurut permen 13 tahun 2006 tentang kompetensi kepala sekolah antara lain : 1) kompetensi kepribadian; 2) kompetensi majjerial; 3) kompetensi kewirausahaan; 4) kompetensi supervise; 5) kompetensi sosial. Dengan kompetensi tersebut kepala sekolah dapat memimpin sekolah dan warga sekolah yang ada di dalamnya. Kepala sekolah harus memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin agar bisa dijadikan teladan dan panutan bagi warga sekolah, terutamapeserta didik. Karena itu, kepala sekolah perlu mengetahui karakteristik atau ciri pemimpin yang efektif. Kepala sekolah merupakan salah satu summmber daya sekolah yng memiliki tugas dan fungsi yang sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses proses persekolahan (Furkan, 2024, hlm. 45-50).

2) Guru

Keberadaan guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan peserta didik tidak bisa dipungkiri, sebab guru berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas manapun di luar kelas baik dalam konteks pembelajaran maupun kegiatan lain. sebagai seseorang yang berhadapan langsung dengan peserta idik, tentu guru harus berperilaku dan bermoral baik, karena perilaku guru secara langsung dan tidak langsung akan diikuti peserta didik. Maka ucapan, sikap dan tindakan guru seyogianya selalu dalam koridor tata nilai dan karakter religious, mengajak peserta didik untuk mau mendalami hal-hal yang berkaitan dengan agama. Guru adalah tokoh sentral pendidikan dalam upaya menyiapkan kader bangs di masa depan, kunci sukses reformasi pendidikan. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hsil belajar siswa, faktor guru mendapat perhatian yang pertama dan utama karena baik buruknya

pelaksanaan kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan arahan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain mendidik, guru harus berusaha membangun pola pikir peserta didik, karena pola pikir yang baik akan berdampak pada perilaku yang baik. Pola pikir seseorang akan menentukan penafsiran terhadap situasi kehidupan dan mempengaruhi cara menangani berbagai persoalan kehidupan. Pola pikir akan membantu guru menyadari bahwa setiap respons yang telah diberikan kan berpengaruh pada kepada profesionalitasnya sebagai guru, dan begitu pun setiap penafsiran yang dihadapi. Selain itu guru harus membangun pola pikir peserta didik agar mampu mengembangkan potensi, kemampuannya serta mengatur potensi yang dimiliki peserta didik agar bisa berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. (Furkan, 2024, hlm. 50).

3) Peserta didik

Undang- undang republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional pasal 1 ayat (4) menyatakan “peserta didik adalah anggt masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.” Peserta didik sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan budaya sekolah karena peserta didik inilah yang akan dibentuk dalam budaya sekolah. Karenanya, keberadaan mereka harus ditumbuhkan berdasarkan penegakan aturan sekolah yang tegas dan didasarkan pada motivasi pribadi peserta didik. Kultur sekolah yang dikembangkan pada diri siswa akan dijadikan pedoman dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu

komponen pendidikan, peserta didik dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain:

4) Pendekatan sosial

Secara sosial, bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Sebagai anggota masyarakat, mereka berada dalam lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya, dan masyarakat yang lebih luas. Peserta didik perlu disiapkan agar pada waktunya mampu melaksanakan perannya dalam dunia kerja dan dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu dimulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan di dalam lingkungan masyarakat sekolah. Dalam konteks inilah, peserta didik melakukan interaksi dengan rekan sesamanya, guru-guru, dan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah. Dalam situasi inilah nilai-nilai sosial yang terbaik dapat ditanamkan secara bertahap melalui proses pembelajaran dan pengalaman.

5) Pendekatan psikologis

Menurut pendekatan psikologis, peserta didik adalah suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Peserta didik memiliki berbagai potensi manusiawi, seperti : bakat, niat, kebutuhan, sosial-emosional-personal, dan kemampuan jasmaniah. Potensi-potensi itu perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, sehingga terjadi perkembangan secara menyeluruh menjadi manusia seutuhnya. Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas dan abilitas dalam diri seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, dan efisiensi. Perkembangan itu bersifat keseluruhan, misalnya perkembangan intelegensi, sosial, emosional, spiritual,. Yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

6) Pendekatan edukatif/pedagogis

Pendekatan edukatif/pedagogis atau pendekatan pendidikan menempatkan peserta didik sebagai unsur penting, yang memiliki

hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu. Peserta didik dalam mendukung terciptanya budaya sekolah memiliki kewajiban, dimana kewajiban tersebut mempengaruhi pola perilaku peserta didik di sekolah. Kewajiban peserta didik antara lain; 1) belajar. Belajar merupakan tugas utama seorang pelajar. Siswa diwajibkan belajar dengan baik di dalam maupun di luar sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru termasuk dalam mewujudkan kinerjanya. 2) menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah baik di luar maupun di dalam sekolah merupakan perwujudan terhadap ketahanan sekolah; 3) tata tertib. Aturan-aturan yang mengarahkan siswa bertingkah laku di sekolah merupakan tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh siswa dengan tata tertib diupayakan siswa memiliki kedisiplinan sehingga mampu menunjang kehidupan bermasyarakatnya; 4) biaya sekolah. Biaya operasional sekolah adalah biaya sekolah yang berasal dari pemerintah yang merupakan pendukung operasional kegiatan harian di sekolah agar sekolah dapat berjalan lancar. Biaya ini hanya untuk membantu meringankan biaya sekolah, bukan berarti sekolah bebas ongkos atau gratis. 5) kewajiban kerja sama. kerja sama antara sekolah dengan pihak masyarakat dalam hal ini wali murid wajib dilaksanakan untuk mendukung seluruh kegiatan sekolah. Kerja sama yang terjalin dengan baik akan mampu memecahkan setiap permasalahan yang ada.

7) Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan atau pegawai tata usaha yang ada di sekolah memiliki andil yang besar bagi terciptanya budaya sekolah melalui kegiatan-kegiatan melayani kebutuhan warga sekolah. Pelayanan yang diberikan tenaga kependidikan tidak boleh mengandung unsur yang membedakan-beda atau diskriminasi. Bagian tata usaha merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satuan pendidikan. Keberadaan tata usaha dalam melayani dimensi administrasi di sekolah memberikan pengaruh bagi kelancaran

proses pendidikan di sekolah. Cocld dan Red Pyramid (2007) (dalam Furkan, 2024, hlm. 164) menjelaskan bahwa untuk memajukan organisasi, staf memerlukan unsur sebagai berikut: 1) *teamwork* yaitu mengutamakan kerja sama tim untuk menghasilkan sinergi yang optimal 2) *innovative* yaitu berfikir dan bertindak kreatif 3) *excellent* yaitu bekerja keras menghasilkan kinerja yang sesuai dengan potensi individu; 4) proaktif yaitu mengambil inisiatif pada saat menghadapi risiko yang mungkin terjadi; dan 5) *responsible* yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas keputusan yang diambil dan tau tindakan yang telah diambil. Pendapat di atas menggambarkan bahwa keberadaan tenaga kependidikan dalam menciptakan budaya sekolah melalui pelayanan yang baik dapat menjadi contoh bagi warga sekolah lain dan membentuk karakter peserta didik untuk melakukan hal yang sama kepada peserta didik yang lain. Untuk mencapai hal itu tenaga kependidikan harus memiliki profesionalisme terhadap tugasnya. Untuk menjadikan tenaga yang profesional perlu dilakukan pelatihan, sebagaimana dikatakan untuk menjadikan tenaga yang profesional perlu dilakukan pelatihan,

8) Visi misi sekolah

Visi merupakan impian bagi sekolah yang akan diraih dalam jangka panjang melalui misi yang dibuat dan disusun dalam bentuk program kerja sekolah. Keberadaan visi dengan misi dan program kerja akan bersinergi agar pelaksanaan kegiatan di sekolah berjalan sesuai dengan harapan warga sekolah. Visi atau wawasan menurut Aan Komariah dan Cepi Triatna dalam bukunya adalah pandangan yang merupakan kristalisasi dan intisari dari kemampuan (*competency*), kebolehan (*ability*), dan kebiasaan (*self efficacy*) dalam melihat, menganalisis, dan menafsirkan. Di dalamnya mengandung intisari dari arah dan tujuan, misi, norma, dan nilai-nilai yang merupakan satu keutuhan yang utuh, sehingga visi merupakan idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan

kekuatan kunci bagi perubahan organisasi. Jika sekolah yang ingin maju dalam pengembangan budaya sekolahnya, maka sekolah harus memiliki visi tentang pengembangan budaya sekolah. Dengan visi yang jelas, program kegiatan yang direncanakan akan mudah diimplementasikan dengan tepat sehingga tujuan sekolah dapat dicapai. Keberadaan visi sangat berkaitan dengan misi dan program kerja karena merupakan rencana yang akan dilakukan sekolah baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang merupakan bentuk dan mewujudkan visi. Oleh karena itu, program sekolah harus mampu mengakomodasi seluruh kepentingan warga sekolah dan proses penyusunan program sekolah harus melibatkan seluruh warga sekolah termasuk komite/orang tua peserta didik atau *stakeholders* lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa tanggung jawab bersama antar semua komponen dalam memajukan sekolah. (Furkan, 2024, hlm. 59)

9) Program sekolah

Program sekolah merupakan materi yang akan dilaksanakan sekolah melalui aktivitas dan kegiatan di sekolah. Program sekolah dikatakan baik apabila telah mengakomodasi kepentingan seluruh warga sekolah, terutama program yang membangun budaya sekolah dan pendidikan karakter. Keberadaan program sekolah memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya budaya sekolah, karena program sekolah akan mencerminkan aktivitas yang dilakukan seluruh warga sekolah. Ketika program sekolah tidak memperhatikan dan tidak membangun budaya sekolah yang kondusif maka akan terjadi konflik kepentingan di dalam sekolah. Karenanya, program sekolah yang disusun haruslah dapat memberikan pengetahuan, pengalaman dan makna bagi setiap warga sekolah serta mampu memobilisasi warga sekolah untuk melakukan aktivitas. Program kerja merupakan rencana yang akan dilakukan sekolah baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Program sekolah harus mampu mengakomodasi seluruh kepentingan warga

sekolah sehingga dalam penyusunan programnya harus melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk komite sekolah dan orangtua peserta didik. Partisipasi semua warga sekolah merupakan syarat keberhasilan perencanaan program karena berbagai kepentingan membentuk budaya sekolah yang kondusif dan keberhasilan pendidikan karakter akan terakomodasi sehingga semua merasa terlibat dan bertanggungjawab dalam kegiatan sekolah. (Furkan, 2024, hlm. 60-61)

10) Peraturan sekolah

Sekolah sebagai institusi pendidikan tentu memiliki aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah. Aturan-aturan sekolah merupakan aturan yang disusun secara bersama-sama oleh warga sekolah atau yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan sekolah merupakan peraturan tata tertib yang dibuat sekolah berdasarkan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi, potensi, kemampuan warga sekolah agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh warga sekolah. Peraturan sekolah yang tidak ditegakkan dengan benar akan mempengaruhi pengembangan budaya sekolah, terutama menanamkan nilai-nilai disiplin pada warga sekolah. Pedoman tersebut menuntut warga sekolah untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan di sekolah. (Furkan, 2024, hlm.61-62).

11) Sarana dan Prasarana sekolah

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan unsur yang terdapat di sekolah dan fungsi mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap tentu akan berbeda proses penyelenggaraan pendidikannya dengan sekolah yang terbatas sarana dan prasarana pendidikannya.

Keberadaan sarana prasarana yang kurang menyebabkan aktivitas peserta didik tidak tersalurkan dengan baik. Begitu pula keberadaan halaman sekolah yang belum ditata dengan baik, seperti pagar sekolah yang tidak terpelihara. Pagar samping dan belakang yang kondisinya rusak menyebabkan peserta didik gampang keluar dari sekolah tanpa izin dengan melewati pagar sekolah yang rusak tersebut sehingga disiplin peserta didik tidak bisa ditegakkan. Sarana dan prasarana yang terbatas, kurang, dan kondisinya tidak baik atau rusak dapat mempengaruhi pengembangan budaya sekolah. Pagar sekolah yang tidak baik dan rusak, misalnya, dapat mempengaruhi pikiran, sikap dan perilaku peserta didik melakukan tindakan melanggar aturan sekolah seperti bolos, karena ada kesempatan untuk melakukan tindakan membolos. Sebaliknya, bila pagar sekolah kondisinya baik anak tidak akan keluar lewat pagar sekolah tetapi melalui pintu masuk dan akan meminta izin pada guru piketnya. Keberadaan sarana dan prasarana di sekolah dapat memberikan manfaat bagi sekolah terutama dalam hal pengembangan budaya sekolah bila dikelola dengan baik. Sarana prasarana yang kurang harus dilengkapi, yang rusak diperbaiki, sehingga tidak ada peluang warga sekolah untuk memanfaatkan keterbatasan dan kersakan sarana untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. (Furkan, 2024, hlm.62-63).

b. Faktor Eksternal

1. Masyarakat

Sekolah sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar tentunya memiliki keanekaragaman dan variasi akibat keragaman asal-usul peserta didiknya, sehingga sekolah dikatakan representasi atau miniature dari karakteristik masyarakat juga sekolah berada ditengah-tengah masyarakat sebagai pengguna output dari sekolah. Begitupun sebaliknya, masyarakat tidak boleh melepaskan diri dari sekolah, sebab sekolah merupakan tempat bagi mereka untuk mendidik dan membina generasi mereka baik ilmu pengetahuan,

sikap, dan keterampilan. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau yang bersifat simbiosis-mutualis inilah yang menyebabkan antara masyarakat dengan sekolah secara bersama-sama membangun dan menyelenggarakan pendidikan.

Dengan begitu segala sesuatu yang berlaku di masyarakat juga akan memberi dampak terhadap proses kehidupan sekolah. Pengembangan budaya sekolah merupakan upaya yang dilakukan sekolah dalam rangka menciptakan suasana atau atmosfer pembinaan bagi peserta didik untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai, norma, adat istiadat yang berlaku di masyarakat serta harus mampu ditanamkan dengan kuat oleh sekolah sebagai lembaga formal yang memiliki kewenangan dalam pembinaan sekolah.

Oleh karena pengaruh masyarakat memiliki dampak yang jelas bagi pengembangan budaya sekolah dalam pendidikan karakter, sehingga sekolah harus bersinergi dengan masyarakat. Masyarakat merupakan dari beberapa individu yang saling berinteraksi. Karakteristik masyarakat dapat dilihat di lingkungan sekolah, karena sekolah merupakan miniature dari kehidupan masyarakat. Tampilan-tampilan keberagaman dalam masyarakat ikut serta mewarnai tampilan peserta didik di sekolah. Sekolah merupakan miniature dari kehidupan masyarakat sehingga apa pun perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat berdampak pada eksistensi sekolah. Begitupun budaya sekolah, tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat sekitar.

Masyarakat yang memiliki budaya menunjang tinggi nilai-nilai kejujuran, kerja sama dan komunikasi yang baik akan mempengaruhi budaya dan kehidupan sekolah tempat peserta didik memiliki kejujuran, kerja sama, sebab peserta didik asal mulanya dari kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial yang terjadi di masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat membentuk perilaku dan mindset awal awal peserta didik dan akan dibawa dalam lingkungan sekolah. Budaya masyarakat di daerah pariwisata tentu cenderung mengedepankan pola interaksi dan aktivitas sosial yang

mencerminkan kehidupan masyarakat pariwisata. Budaya masyarakat di perkotaan memiliki pola hidup yang individualis, glamor dan menghambat pada materi sebagai ukuran keberhasilan hidup bila dibandingkan dengan budaya masyarakat yang hidup di desa yang lebih mengutamakan sifat gotong-royong kebersamaan, jujur dan lain-lain. tiap masyarakat mempunyai sistem tata nilainya sendiri yang coraknya berbeda dengan masyarakat lain. dalam sistem nilai itu senantiasa terjalin nilai-nilai kebudayaan nasional dengan nilai-nilai kebudayaan lokal yang unik. Dalam nilai-nilai itu terdapat jenjang prioritas. Ada nilai yang dianggap paling tinggi daripada yang lain yang dapat berbeda menurut pendirian individual.

Dalam masyarakat kota yang mempunyai universitas dan penduduk yang intelektual sikapnya lebih liberal, lebih terbuka bagi modernisasi dan pendirian atau bentuk kelakuan yang baru, yang lain daripada yang lain, baik tentang buah pikiran, moral, maupun tentang pakaian, pergaulan, dan lainnya sebaliknya, dalam masyarakat pedesaan yang mempunyai tradisi yang kuat dan yang sangat taat kepada agama, sikap dan pikiran orang lebih homogeny. Penyimpangan dari yang lazim segera akan mendapat kecaman dan kelakuan setiap orang diawasi dan diatur oleh orang sekitarnya. Budaya dan pola hidup masyarakat yang berbeda-beda akan membentuk anak didik di lingkungan masing-masing yang kemudian akan mereka bawa di lingkungan masing-masing yang kemudian akan mereka di lingkungan sekolah. Pada gilirannya akan tercipta budaya sekolah yang negative dan positif bila tidak segera diantisipasi melalui optimalisasi warga sekolah lain dalam membentuk budaya sekolah yang kondusif dan dapat mengakomodasi semua perbedaan sehingga mampu mengubah perilaku peserta didik dan menunjukkan karakter yang baik pula. Pola hubungan sekolah dengan masyarakat yang baik memberikan dampak yang besar bagi terciptanya budaya sekolah dan pendidikan karakter peserta didik. Sebab pendidikan merupakan metode untuk menuju kemajuan dan perubahan sosial, nilai sekolah

menjalankan fungsinya sebagai bentuk watak peserta didik yang ada di lingkungan masyarakat. Sejauh sekolah memainkan peran penting dalam proses pembentukan watak anak dalam masyarakat tertentu, maka sekolah sebenarnya dapat melakukan tugas tersebut. Dan jika sekolah dirancang untuk melaksanakan tugas semacam itu, maka secara fundamental sekolah dapat mengubah masyarakat tersebut. Sekolah menyediakan lingkungan yang relatif terkontrol di mana berbagai syarat untuk pengembangan diri dapat secara efektif membentuk jalurnya sendiri. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki peran yang cukup berarti bila masyarakat atau lingkungan masyarakat di sekitar sekolah memahami dampak dari keberadaan masyarakat.

Artinya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah harus memperhatikan kondisi masyarakat setempat agar tidak terjadi kontraproduktif antara yang dipelajari dan dipahami peserta didik dengan kondisi nyata di lingkungan masyarakat, sehingga pendidikan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dapat dibayangkan sebagai selembar kain batik. Dalam hal ini, motif-motif atau pola-pola gambarnya adalah lembaga pendidikan dan kain latarnya adalah masyarakat. Pendidikan atau sekolah memberikan manfaat kepada masyarakat begitu pula masyarakat memberikan dukungan kepada sekolah. Hubungan seperti itu jelas menguntungkan kedua belah pihak. Manfaat pendidikan bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan peranan mereka sebagai warga masyarakat, baik yang berkaitan dengan kewajiban maupun hak mereka. Pendidikan itu kunci bagi pemecahan masalah-masalah sosial dengan cara melatih anak secara tepat sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal (Furkan, 2024, hlm. 63-68).

2. Komite sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di suatu pendidikan/sekolah. Oleh karena itu peran

komite sekolah harus sesuai dengan fungsi komite sekolah termasuk dukungan dalam pendidikan karakter peserta didik. Sinergi antara sekolah dengan komite sekolah merupakan hal penting dalam membangun karakter peserta didik. Sebab lingkungan masyarakat sebagai ruang interaksi peserta didik di luar lingkungan sekolah merupakan situasi dan kondisi yang bisa dijadikan penguatan bagi peserta didik dalam pembiasaan dan pembudayaan karakter peserta didik. Oleh karena itu, peran komite sekolah harus sesuai dengan fungsi komite sekolah termasuk dukungan dalam pendidikan karakter peserta didik. Fungsi komite sekolah, sebagaimana yang tertuang dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kemudian dimasukkan utamanya ke dalam pasal 56 ayat 1 dan ayat 3 dalam Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, menyatakan: Pasal 56 (1): Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; Pasal 56 (3): Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Kandungan isi pasal tersebut di atas menegaskan peran komite sekolah dalam pendidikan di sekolah, termasuk di dalamnya peran komite sekolah dalam membentuk karakter peserta didik. Maka, komite sekolah berkewajiban untuk turut bersama-sama sekolah mengembangkan budaya sekolah yang kondusif. Ini berarti bahwa komite sekolah merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi pengembangan budaya sekolah.

3. Orangtua dan keluarga.

Lembaga utama dan pertama bagi anak adalah kehidupan, sebab anak terlahir dan belajar pertama dari keluarga. Karakteristik keluarga akan tercermin pada perilaku anak. Jika orang tua dan keluarga

menanamkan nilai-nilai yang baik maka anak menampakkan nilai-nilai yang baik pula. Sebaliknya, bila orang dan keluarga menanamkan nilai-nilai yang tidak baik maka akan mempengaruhi anak untuk berperilaku tidak baik pula. Peran orangtua dan keluarga dalam pendidikan karakter tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Maka, sinergi pembinaan yang dilakukan keluarga dan orangtua dengan sekolah dalam pengembangan budaya akan mampu mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Sebab proses penguatan pengembangan budaya sekolah bukan saja datang dari sekolah tetapi juga dari lingkungan keluarga dan orangtua. Pembiasaan yang dilakukan di lingkungan keluarga merupakan implementasi dari pembiasaan keseharian yang dilakukan di sekolah atau sebaliknya, pembiasaan keseharian di rumah dapat dibina dengan baik di sekolah sehingga hubungan sekolah dengan keluarga dan orangtua ailing membutuhkan. Pengembangan budaya sekolah dalam pendidikan karakter akan berjalan dengan baik bila didukung oleh hubungan dan kerja sama antar sekolah dengan orangtua siswa dan masyarakat. Pengemangan kultur sekolah akan lebih efektif dan efisien kalau dikerjakan tidak oleh sekolah sendiri melainkan dengan melakukan kerja sama sekolah dengan orang tua siswa. Kultur sekolah merupakan sub-kuktur masyarakat. Masyarakat intinya adalah keluarga. Dengan kata lain, keluarga bisa berperan dalam mengembangkan kultur sekolah. Oleh karena itu, sekolah memerlukan kerja sama keluarga, dalam arti agar orangtua bersedia menyesuaikan kegiatan di lingkungan sebagaimana yang dilakukan di sekolah. Bila di sekolah terdapat jadwal, aturan, tata-tertib, dan sanksi-penghargaan, maka di keluarga juga perlu dikembangkan jadwal, aturan tata tertib dan penghargaan-sanksi. Tanpa ada keserasian antara kehidupan sekolah dan kehidupan keluarga, perubahan atau pengembangan kultur baru sekolah hampir-hampir sulit untuk direalisasikan (Furkan, 2024, hlm.70-71).

4. Dinas Pendidikan setempat.

Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang menangani bidang pendidikan merupakan satuan kerja dari pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar dalam menciptakan budaya sekolah dan pendidikan karakter secara langsung maupun tidak langsung. Sebab dinas pendidikan memiliki kepentingan yang besar untuk mencapai visi pendidikan melalui keputusan-keputusan dan regulasi yang mencerminkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang mengusung terciptanya budaya sekolah yang kondusif. Regulasi dan keputusan yang tidak produktif dan tidak terarah menyebabkan sekolah tidak mampu menerjemahkan dan mengaplikasikannya di sekolah. Selain itu, daya dukung sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan dinas Pendidikan sangat penting, apalagi artinya regulasi diberikan tanpa ada dukungan infrastruktur yang baik. Rencana pembangunan pendidikan yang disusun Dinas Pendidikan harus mencerminkan pendidikan sebagai transmisi kebudayaan. Pendidikan sebagai pengembangan kepribadian melalui pembangunan pendidikan yang mengedepankan hakikat pendidikan yang sebenarnya karena rencana tersebut akan menjadi kerangka berpikir atau pedoman bagi sekolah untuk menyusun rencana pengembangan sekolah. Dinas pendidikan harus mampu membangun budaya dan membentuk karakter sumber daya manusia. pengelolaan pendidikan dalam lingkungan dinas itu sendiri merupakan contoh bagi organisasi dibawahnya. Kalau Dinas pendidikan memiliki budaya kerja tidak memiliki nilai-nilai dan norma dalam bekerja, maka bisa saja akan menjadi cermin bagi pengelolaan pada tingkat bawah. Karenanya, keberadaan dinas pendidikan turut menentukan terciptanya budaya sekolah dan pendidikan karakter di sekolah (Furkan, 2024, hlm. 71-72).

5. Letak geografis sekolah.

Letak sekolah mempengaruhi proses pengembangan budaya sekolah. Sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat pemerintahan cenderung selalu menata kondisi sekolah disebabkan ada rasa takut

atau khawatir selalu diawasi walaupun memang ada juga sekolah yang tidak bersikap seperti itu. Adapun sekolah yang jauh dari pusat pemerintahan cenderung bersikap biasa-biasa saja karena menganggap tidak ada pengawasan yang ketat. Tindakan dan pelaksanaan pengembangan budaya sekolah atas dasar rasa takut dan khawatir diawasi dan bukan karena kesadaran diri warga sekolah akan mempengaruhi pola dan perilaku sekolah dalam mengembangkan budaya sekolah. Pola dan sikap sekolah yang merasa takut dan khawatir karena diawasi sangat tidak baik dalam pengembangan budaya sekolah, karena budaya sekolah pada akhirnya akan mempengaruhi karakter peserta didik. Sebaliknya, pengembangan budaya sekolah yang didasari kepentingan peserta didik, maka hasilnya peserta didik akan memiliki karakter sesuai yang diharapkan sekolah. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan budaya sekolah memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam pengembangan budaya sekolah serta saling mempengaruhi. Kegagalan salahsatu fungsi komponen tersebut mengakibatkan budaya sekolah tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, apabila sekolah berkeinginan agar pengembangan budaya sekolah berjalan baik dan berhasil membentuk perilaku dan akhirnya menjadi karakter warga sekolah terutama peserta didik maka fungsi dan peran komponen sekolah dalam pengembangan budaya sekolah penting untuk diperhatikan. Karena hal tersebut bersifat dalam pengembangan budaya sekolah agar tercipta budaya sekolah yang kondusif sebagai tempat persemaian karakter warga sekolah. Selain faktor internal, sekolah juga perlu memperhatikan faktor eksternal dapat memberikan andil yang besar bagi keberhasilan pengembangan budaya di sekolah. Dukungan faktor eksternal semakin penting artinya mankala ada kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah harus pula dilanjutkan dilingkungan keluarga dan masyarakat. Maka, peran orangtua, komite sekolah, dan masyarakat juga sangat dibutuhkan agar kelanjutan

pembinaan anak tidak terhenti di lingkungan sekolah begitu pula kebijakan pengembangan budaya sekolah terasa akan lengkap bila didukung pula oleh pemerintah atau dinas terkait yang memiliki hubungan formal dengan sekolah, sehingga sekolah tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan budaya sekolah. Dengan demikian terjadi keselarasan antara pemerintah daerah atau dinas pendidikan dengan sekolah yang hal tersebut sangat penting pula bagi keberhasilan pengembangan budaya sekolah yang dilakukan sekolah (Furkan, 2024, hlm.73).

C. Kajian mengenai Pendidikan Karakter

1. Definisi Pendidikan Karakter

Karakter adalah sikap dan tindakan dengan nilai-nilai moral yang ideal yang seolah-olah sudah terbentuk dalam pribadi orang sebagai kebiasaan. Karakter harus dibentuk melalui interaksi yang penuh dengan muatan perasaan dan kedekatan dengan anak sehingga nilai-nilai moral dapat diresapi dan dihayati dan selanjutnya menjadi bagian dari sikap dirinya yang dilakukan dalam tindakan kehidupan. Karakter merupakan sesuatu yang harus dibangun melalui proses interaksi yang tidak mudah dilakukan. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Karakter adalah suatu bentuk sikap yang bersifat konstan dan dinyatakan dalam bentuk tindakan, tetapi secara khusus diartikan sebagai suatu bentuk sikap khusus di mana seseorang dalam tindakannya terhadap orang lain menampilkan nilai absolut. Berarti nilai universal seperti penghargaan (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), mempercayai (*trust*) yang ditampilkan dalam suatu sikap dan tindakan adalah merupakan bentuk karakter seseorang. Karakter merupakan pribadi

seseorang pada aspek pikiran maupun tindakan. Karakter yang baik akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dengan situasi baik tepat. Sebaliknya, karakter seseorang yang tidak baik mendorong untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan ketentuan yang berlaku. Selain itu karakter menentukan eksistensi seseorang dalam interaksi di lingkungan sosial, keluarga dan masyarakat. Pendidikan karakter menurut Triyo Supriyanto (2010) (dalam Furkan, 2024, hlm. 2) mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan berperilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah (Ahkmad Sudrajat, 2010:1 dalam Furkan, 2024).

2. Landasan Pendidikan Karakter di Indonesia

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu telah ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. (Bafadhol, 2003) Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal tersebut sudah tertuang pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun, 2003).

Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan karakter sebagai prioritas program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010). Isi dari rencana aksi tersebut adalah bahwa “pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik & mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati”. Sementara itu, dalam INPRES No. 1 Tahun 2010 disebutkan “penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa”.

Di lain sisi, dalam latar belakang UUSPN Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ulfiahmi, Kemendiknas: 2012 dalam (Furkan, 2024) Atas dasar itu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana

yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (*moral knowing*), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau loving good (*moral feeling*), dan perilaku yang baik (*moral action*). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan. Dengan demikian, jelaslah sudah landasan dan alasan penerapan pendidikan karakter di Indonesia.

3. Pentingnya Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan kita mengingat berbagai macam perilaku yang non-edukatif kini telah merambah dalam lembaga pendidikan kita seperti fenomena kekerasan, pelecehan seksual, bisnis manusia lewat sekolah, korupsi dan kesewenang-wenangan yang terjadi di kalangan sekolah. Tanpa pendidikan karakter, kita membiarkan campur aduknya kejernihan pemahaman akan nilai-nilai moral dan sifat ambigu yang menyertainya, yang pada gilirannya menghambat para siswa untuk dapat mengambil keputusan yang memiliki landasan moral kuat. Pendidikan karakter kan memperluas wawasan para pelajar tentang nilai-nilai moral dan etis yang membuat mereka semakin mampu mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, pendidikan karakter yang diterapkan dalam lembaga pendidikan kita bisa menjadi salah satu sarana pembudayaan dan pemanusiaan agar peserta didik memiliki sifat yang mulia. Menurut Books dan Goble (1997:34) (dalam Furkan, 2024), pendidikan karakter yang secara sistematis diterapkan dalam pendidikan dasar dan menengah merupakan sebuah daya tawar berharga bagi seluruh komunitas. Para siswa mendapatkan keuntungan dengan memperoleh perilaku dan kebiasaan positif yang mampu meningkatkan rasa percaya dalam diri mereka, membuat hidup mereka lebih bahagia dan lebih produktif. Tugas-tugas guru menjadi lebih ringan dan lebih memberikan keputusan ketika para siswa memiliki disiplin yang lebih besar di dalam

kelas. Orang tua bergembira ketika anak-anak mereka belajar untuk menjadi lebih sopan, memiliki rasa hormat dan produktif.

Para pengelola sekolah akan menyaksikan berbagai macam perbaikan dalam hal disiplin, kehadiran, beasiswa, pengenalan nilai-nilai moral bagi siswa maupun guru, demikian juga berkurangnya tindakan vandalisme di dalam sekolah. Lickona, (2012) menjelaskan beberapa alasan perlunya pendidikan karakter, diantaranya: 1) banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral; 2) memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama; 3) peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orangtua, masyarakat, atau lembaga keagamaan; 4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab; 5) demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk dan oleh masyarakat; 6) tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain; 7) komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi guru yang baik; dan 8) pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang meningkat. Pendidikan karakter sangat penting dan mendesak untuk dilakukan pada satuan pendidikan seperti yang ditegaskan oleh beberapa pakar pendidikan, bahwa terbentuknya karakter (kepribadian) manusia ditentukan oleh dua faktor yaitu: 1) *nature* (faktor alami atau fitrah); 2) *nuture* (sosialisasi dan pendidikan) (Megawangi R, 2004 dalam Furkan, 2024).

4. Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dharma (2015) (dalam Furkan, 2024, hlm.10) Mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa seharusnya memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus berdampak pada watak manusia/ bangsa Indonesia tau karakter. Karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Dari kematangan karakter inilah, kualitas seorang pribadi dapat diukur. Tujuan pendidikan karakter meliputi :

- 1) Mendorong kebiasaan perilaku yang terpuji sejalan dengan nilai- nilai universal, tradisi budaya, kesepakatan sosial, dan religiositas agama.
- 2) Menanamkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab sebagai penerus bangsa.
- 3) Memupuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik terhadap situasi sekitarnya, sehingga tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun sosial.
- 4) Meningkatkan kemampuan menghindari sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
- 5) Agar siswa memahami dan menghayati nilai- nilai yang relevan bagi pertumbuhan dan penghargaan harkat dan martabat manusia.

5. Lingkungan Pembina Karakter Peserta Didik

Eksistensi manusia tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, misalnya keluarga. Ada faktor-faktor lain seperti lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan (dalam hal ini sekolah), dan secara tidak langsung lingkungan dunia usaha dan dunia industry yang memberikan andil sangat besar terhadap pembentuk karakter manusia. keempat lingkungan ini harus bersinergi dalam membangun dan membina karakter anak agar menjadi anak yang berakhlak baik. Pendidikan karakter tidak serta merta dimiliki anak. Pendidikan karakter perlu diajarkan melalui pembinaan pada lingkungan pendidikan informal, formal dan non formal agar anak memiliki sifat-sifat sesuai dengan karakter yang diharapkan, seperti bertanggung jawab, memiliki rasa ormat, memiliki kejujuran, keadilan,

kewarganegaraan, peduli, disiplin diri, dan ketekunan. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggungjawab pendidikan formal tapi juga semua model pendidikan yang ada. Dalam Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 dapat terlihat ketiga model lembaga pendidikan pendidikan tersebut. Dikatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Sementara itu, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Adapun pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri (Suyatno, 2010 dalam Furkan, 2024). Ada kecenderungan bahwa pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal yang selama ini berjalan terpisah satu dengan yang lainnya. Mereka tidak saling mendukung untuk peningkatan pembentukan kepribadian peserta didik. Setiap lembaga pendidikan tersebut berjalan sendiri-sendiri sehingga proses pembentukan pribadi peserta didik menjadi parsial. Untuk menunjang keberhasilan implementasi pendidikan karakter dan memberikan penguatan bagi anak, sangat diperlukan hubungan yang sinergis dan saling terkait antara lembaga pendidikan tersebut tidak ada lagi pemisahan dan saling melepaskan diri dalam pembinaan anak. Tanpa adanya sinergi antar lembaga pendidikan tersebut tidak akan mungkin karakter anak akan terbentuk dengan baik.

6. Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter

Lickona, (2012, hlm.50) mengatakan, *good character is what we want for our children. Of what does it consist?* Sedangkan Aristoteles berpendapat *good character as the life of right conduct-right conduct in relation to one self*. Menurut Michael Novak, *Character is a compatible mix of all those virtues identified by religious tradition, literary stories, the*

sages, and persons of common sense down through history. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan pentingnya seorang anak memiliki karakter yang baik dalam membangun dan mengkonstruksi pola pikir sebagai bekal berinteraksi dengan lingkungannya. Karakter juga memiliki hubungan yang erat dengan tiga hal yaitu: akhlak pengetahuan (*moral knowing*), akhlak perasaan (*moral feeling*), dan akhlak tingkah laku (*moral behavior*). Karakter yang baik sangat konsisten dengan pengetahuan yang baik, hasrat yang baik, dan mengerjakan yang baik-kebiasaan dari pikiran, kebiasaan dari hati, kebiasaan dari tindakan. Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan untuk kepemimpinan sebuah kehidupan bermoral. Ketiga hal tersebut dapat memunculkan kedewasaan. Ketika kita berpikir tentang macam-macam karakter, kita menginginkan untuk anak. Kita ingin mereka memiliki kemampuan untuk menjadi hakim, yang memiliki kepedulian yang mendalam tentang apakah itu kebenaran, yang dan dalam bekerja mereka percaya sesuatu yang benar (Lickona, 2012, hlm.51).

7. Pendidikan Karakter dalam Perspektif PPKn

a. Nilai-nilai Pancasila sebagai Landasan Pendidikan Karakter

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan bagi Pendidikan karakter. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- 1) Ketuhanan yang Maha Esa : Mengajarkan pentingnya keyakinan dan toleransi beragama
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : menekankan pada penghargaan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil
- 3) Persatuan Indonesia : mendorong semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan : mengajarkan nilai demokrasi, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
- 5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia: menekankan pentingnya keadilan social dan pemerataan kesejahteraan.

b. Implementasi Nilai-nilai karakter dalam PPKn/Pendidikan Pancasila

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran aktif dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Melalui PPKn, siswa diajarkan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mengaplikasikannya dalam berbagai situasi (Hakim, 2023 dalam Anugrah & Rahmat, 2024). Strategi mikro pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan integrasi ke dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap mata pelajaran terkhusus PPKn, melalui budaya sekolah (dengan pembiasaan dalam kegiatan/keseharian di satuan pendidikan), melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (seperti pramuka, olahraga, karya tulis, dsb), serta penerapan pembiasaan kehidupan keseharian di rumah yang sama dengan di satuan pendidikan (Tim Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional (2010). Berikut adalah beberapa cara bagaimana materi dan pembelajaran PPKn dapat ditanamkan nilai-nilai karakter:

- 1) Pengajaran Teoretis: Menyampaikan konsep-konsep dasar Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pembelajaran tentang sejarah, makna, dan implementasi nilai-nilai Pancasila.
- 2) Diskusi dan Debat: Menggunakan metode diskusi dan debat untuk membahas isu-isu moral dan etika yang relevan dengan kehidupan siswa. Ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang etis.
- 3) Studi Kasus: Menganalisis studi kasus yang mengandung dilema moral untuk membantu siswa memahami kompleksitas penerapan nilai-nilai karakter dalam situasi nyata.
- 4) Proyek Sosial: Mengadakan proyek sosial atau kegiatan kemanusiaan yang melibatkan siswa secara langsung dalam upaya membantu masyarakat. Ini membantu siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kerja sama.

5) *Role-Playing*: Melakukan simulasi atau permainan peran (*role-playing*) di mana siswa dapat memerankan situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) secara kurikuler dirancang untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Selain itu, PPKn secara teoritis dirancang sebagai pembelajaran yang memuat dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling terintegrasi dalam konteks substansi konsep, ide, nilai, dan moral Pancasila, serta kewarganegaraan yang demokratis.

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila, pendidikan karakter bukan hanya bertujuan membentuk karakter pribadi peserta didik, namun juga bertujuan untuk melatih sikap sebagai warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*). Karakter tersebut termasuk ke dalam bagian *civic disposition* yang mencakup sikap hormat terhadap hak orang lain, menaati aturan, peduli terhadap masyarakat, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Melalui Pendidikan Pancasila, peserta didik diharapkan bukan hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) saja, melainkan juga dapat memiliki karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) sehingga mereka mampu menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Cahyono *et al.*, 2024).

D. Kajian mengenai Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab secara leksikal berarti "keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)". Dalam bahasa Inggris "*responsibility*", sedangkan dalam Bahasa Arab "*mas'liyyah*". *Responsibility*, secara leksikal berarti "hubungan suatu tindakan dengan seseorang", atau dapat pula berarti "tanggung jawab". Adapun *mas'liyyah*, secara leksikal berarti "keadaan atau

sifat orang yang ditanya tentang urusan yang akibatnya (konsekuensinya) berada di pundaknya". Dari pengertian leksikal yang telah dikemukakan ini, tanggung jawab itu merupakan kaitan antara tindakan atau urusan dan orang. Kaitan tersebut berupa hubungan konsekuensi, dalam arti akibat tindakan atau urusan itu dibebankan kepada orang lain. Dikatakan keadaan, menggambarkan suasana atau situasi ketika yang bersangkutan melaksanakannya, sedangkan sifat, menggambarkan ciri yang sudah menetap pada orang tersebut dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tanggung jawab. Lebih lanjut, definisi pertama yang memuat ungkapan "wajib menanggung segala sesuatunya" dan definisi ketiga yang memuat "urusan yang akibatnya (konsekuensinya) berada di pundaknya", menggambarkan satu kewajiban yang dibebankan oleh pihak lain.

Dalam hal ini, Erich Fromm (dalam Furkan, 2024) seorang pakar psikologi, keberatan dengan pengertian tanggung jawab seperti ini. Menurutnya tidak benar pandangan bahwa tanggung jawab itu diartikan sebagai tugas atau sesuatu yang dibebankan kepada seseorang oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Baginya tanggung jawab adalah suatu tindakan yang sama sekali sukarela. Definisi lain yang memandang dari segi akhlak menyebutkan "tanggung jawab adalah konsekuensi seseorang terhadap apa yang terbit dari dirinya, baik berupa perkataan, maupun perbuatan". Sedangkan dari pandangan perundang-undangan dikatakan "tanggung jawab adalah kewajiban merehabilitasi (memulihkan) kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, sesuai perundang-undangan". Pandangan yang berdasar pada akhlak di atas memang tidak secara tegas menggambarkan adanya paksaan dari luar, dan konsekuensi itu memang logis, keterbatasannya adalah terikat pada apa yang terkait dari dirinya sendiri, tidak ada kaitan dengan apa yang terbit dari orang lain. Sedangkan pandangan yang berdasar undang-undang terlihat sangat memaksa. Hal ini memang logis, karena apa yang terdapat dalam undang-undang itu harus dilaksanakan sebagaimana adanya (selama tidak ada penjelasan yang membawa kepada arti yang lain). Karena itu, seseorang yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, harus diperbaiki sesuai undang - undang. Terjadinya

pengertian itu, karena didasari oleh sudut pandang yang berbeda. Yang memberi tekanan pada pelaku tanggung jawab, memahami bahwa tanggung jawab itu merupakan kesadaran atau keinsafan atau pengertian yang bersumber pada unsur budaya dalam diri manusia. Karena itulah Erich Fromm (dalam Furkan, 2024) memahami tanggung jawab itu sebagai suatu tindakan yang sama sekali sukarela. Sukarela merupakan tindakan yang tidak semua orang dapat melakukannya dengan mudah, karena ia harus berdasar pengertian yang dapat menumbuhkan kesadaran dan keinsafan. Itulah sebabnya, ada orang yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Mungkin saja dia mengetahui, tetapi pengetahuannya itu tidak menumbuhkan kesadaran dan keinsafan untuk melakukannya, mungkin pula orang itu tidak mengetahui sama sekali akan tanggung jawabnya itu. Dalam kondisi seperti ini, perlu adanya pihak lain yang memaksa agar seseorang mau melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini dapat dipahami apabila orang memberi tekanan pada kepentingan pihak lain yang terkait dengan tanggung jawab tersebut.

Definisi yang mencakup kedua hal yang dipertentangkan itu dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa tanggung jawab adalah "wajib menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, berkorban untuk kepentingan pihak lain". Kutipan ini tidak mempertentangkan sama sekali antara adanya paksaan dari pihak luar dan kerelaan yang terbit dari diri seseorang, bahkan melihatnya sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Satu sisi memuat adanya tuntutan dari luar dengan ungkapan wajib menanggung atau memikul beban atau memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, baik perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain yang ada kaitan dengannya. Di sisi lain, adanya kerelaan mengabdikan atau berkorban untuk kepentingan pihak lain, dalam hal ini bisa orang lain, lingkungan atau Tuhan. Lebih jauh Abdulkadir Muhammad (dalam Karim, 2013) menjelaskan bahwa tanggung jawab itu sendiri adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat atau pihak lain, atau sebagai pengabdian atau pengorbanan pada

pihak yang Kewajiban atau beban ini ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri, atau pihak lain, sehingga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sesama manusia, antara manusia dan lingkungannya, atau antara manusia dan Tuhan selalu terpelihara dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab itu adalah kewajiban atau beban yang harus dilakukan untuk kebaikan pelakunya atau pihak lain, demi terpeliharanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sesama manusia, antara manusia dan lingkungannya, atau antara manusia dan Tuhannya.

2. Tanggung Jawab Kewarganegaraan (*Civic Responsibility*)

Tanggung jawab kewarganegaraan merupakan salah satu bagian dari civic disposition yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Konsep ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran individu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Cahyono *et al.*, (2024), *civic responsibility* menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter kewarganegaraan karena mendorong individu untuk mengimplementasikan pengetahuan kewarganegaraan melalui tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pengembangan *civic responsibility* tidak hanya difokuskan pada penguasaan aspek kognitif, tetapi juga diarahkan untuk pembentukan sikap, karakter, dan perilaku yang mencerminkan kepedulian sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kesadaran dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Selain itu, sebagai bagian dari karakter kewarganegaraan, *civic responsibility* diwujudkan melalui beberapa bentuk perilaku yang mencerminkan partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Cahyono *et al.*, (2024) mengemukakan bahwa tanggung jawab kewarganegaraan meliputi kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, kemampuan mengawasi kinerja pemimpin yang dipilih, menjalin komunikasi dengan lembaga pemerintahan, berpartisipasi dalam pemilihan umum, memenuhi kewajiban perpajakan, memberikan kesaksian di pengadilan apabila diperlukan, serta

memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam upaya pembelaan negara. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa *civic responsibility* merupakan karakter yang penting untuk dikembangkan melalui Pendidikan Pancasila agar peserta didik mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan kontribusi positif bagi kepentingan bersama.

3. Macam-macam Tanggung Jawab

Ilmu budaya dasar mengemukakan empat macam tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian diharapkan dia dapat memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri.
- 2) Tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Tanggung jawab ini menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajibannya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Kewajiban di sini, menyangkut hubungan antar individu dan masyarakatnya. Hubungan antarindividu menuntut adanya keseimbangan antara kewajiban yang dipenuhi dan hak yang diperoleh.
- 3) Sedangkan hubungan antara individu dan masyarakatnya menuntut bukan hanya keseimbangan kewajiban dan hak, melainkan juga menuntut pengorbanan atau pengabdian, demi terciptanya keseimbangan atau keselarasan antara individu dan masyarakatnya.
- 4) Tanggung jawab terhadap lingkungannya. Tanggung jawab ini menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajibannya atau pengorbanannya dalam membina dan melestarikan lingkungan hidup yang baik, teratur dan sehat. Dengan demikian diharapkan manusia dapat memecahkan masalah lingkungan hidup yang berpengaruh pada nilai kemanusiaan.
- 5) Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab ini menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban atau pengabdian

terhadap Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya menciptakan manusia dan memberikan rezeki kepadanya. Wujud semua tanggung jawab ini dapat diketahui apabila sudah dinyatakan dalam perbuatan yang menghasilkan kematangan pribadi, suasana keseimbangan atau keselarasan antara manusia. Perbuatan itu harus didasari oleh kesadaran, yakni kesengajaan karena dikehendaki sebagai pemenuhan kewajiban, pengabdian dan pengorbanan.

Dengan demikian, dapat diketahui hakikat tanggung jawab itu adalah pelaksanaan kewajiban pengabdian, dan pengorbanan yang disengaja yang dapat menghasilkan kematangan pribadi, keseimbangan atau keselarasan antara sesama manusia. Apabila salah satunya tidak ada, atau bahkan keseluruhannya, berarti tidak ada tanggung jawab. Tidak bertanggung jawab berarti penyelewengan. Penyelewengan dapat disengaja karena dikehendaki, dapat pula tidak disengaja. Apabila terjadi penyelewengan, maka harus ada pihak lain yang memberi perantara untuk memulihkan tanggung jawab itu, baik antara keluarga, anggota masyarakat, pengadilan, atau Tuhan yang memberikan petunjuk atau pembalasan. Pembagian tanggung jawab kepada empat macam tadi, karena didasarkan atas sasaran (terhadap apa atau siapakah tanggung jawab itu dilakukan). Penulis melihat adanya sisi lain yang memungkinkan untuk membagi tanggung jawab itu dalam pembagian yang lain, yaitu dengan melihat pada pelakunya, apakah tanggung jawab itu harus dilakukan sendirian, atau bersama-sama dengan orang lain. Dalam hal ini penulis membagi tanggungjawab itu kepada tanggung jawab individual dan tanggung jawab kolektif. Kedua tanggung jawab ini akan dibahas pada bahasan berikut.

4. Tanggung Jawab Individu dan Tanggung Jawab Kolektif

1) Tanggung Jawab Individu

Tanggung jawab individu merupakan konsep yang terbentuk dari dua istilah, yaitu tanggung jawab dan individu. Secara konseptual, kata individu berfungsi sebagai penjelas yang memberikan makna khusus

terhadap tanggung jawab, sehingga menunjuk pada bentuk tanggung jawab yang bersifat personal atau melekat pada diri seseorang. Secara etimologis, istilah individu berasal dari bahasa Inggris individual yang merujuk pada sesuatu yang bersifat perseorangan, mandiri, dan berkaitan dengan pribadi seseorang. Dalam konteks ini, tanggung jawab individu dapat dimaknai sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif filosofis dan pendidikan, tanggung jawab individu berkaitan dengan kesadaran seseorang terhadap konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup perbuatan nyata, tetapi juga mencerminkan kesadaran moral dan etis sebagai makhluk yang memiliki akal dan hati nurani. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk penggunaan pancaindra seperti pendengaran, penglihatan, serta kemampuan berpikir dan merasakan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab individu tidak hanya bersifat horizontal (terhadap diri sendiri), tetapi juga vertikal (kepada Tuhan). Dengan demikian, tanggung jawab individu dapat dipahami sebagai kesadaran dan kewajiban pribadi seseorang dalam melaksanakan tindakan serta menerima konsekuensi dari tindakan tersebut, baik dalam dimensi moral, sosial, maupun spiritual. Setiap aktivitas yang dilakukan individu pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan secara personal. Meskipun demikian, manusia tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, selain memiliki tanggung jawab individu, manusia juga memiliki tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Tanggung jawab Kolektif

Tanggung jawab kolektif merupakan konsep yang terdiri atas dua unsur utama, yaitu tanggung jawab dan kolektif. Secara konseptual, kata kolektif berfungsi sebagai penjelas yang memberikan makna bahwa tanggung jawab tersebut bersifat bersama atau dilakukan oleh

suatu kelompok. Secara etimologis, istilah kolektif berasal dari bahasa Inggris *collective* yang berarti bersama-sama atau gabungan. Dengan demikian, tanggung jawab kolektif dapat dimaknai sebagai tanggung jawab yang dimiliki dan dijalankan oleh sekelompok individu atas tindakan atau kepentingan bersama dalam suatu komunitas. Untuk memahami konsep tanggung jawab kolektif secara lebih komprehensif, perlu dikaitkan dengan pengertian tanggung jawab secara umum, yaitu sebagai kewajiban untuk melaksanakan tugas serta menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Dalam konteks kolektif, tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada satu individu, melainkan kepada kelompok sebagai satu kesatuan. Dalam praktiknya, tanggung jawab kolektif tidak selalu dilaksanakan oleh seluruh anggota komunitas secara langsung. Sering kali, hanya sebagian anggota yang menjalankan tanggung jawab tersebut atas nama kelompok secara keseluruhan. Dalam kondisi demikian, anggota lain yang tidak terlibat secara langsung tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut secara individu, selama tanggung jawab tersebut telah diwakili oleh anggota kelompok yang menjalankannya. Namun demikian, setiap anggota dalam suatu komunitas tetap memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Artinya, tanggung jawab kolektif tetap menuntut partisipasi anggota, meskipun dalam bentuk dan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Sebagai ilustrasi, dalam suatu masyarakat yang berupaya menjaga kesehatan bersama, pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dapat dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak. Pembangunan tersebut melibatkan berbagai peran, seperti penyedia dana, tenaga ahli dalam perancangan bangunan, pekerja konstruksi, tenaga medis, hingga petugas administrasi. Selain itu, diperlukan pula peran penyuluh kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Contoh ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kolektif dilaksanakan melalui kontribusi berbagai individu sesuai dengan keahlian dan perannya masing-masing. Konsep tanggung jawab

kolektif memiliki kemiripan dengan konsep wajib kifayah dalam kajian hukum Islam, yaitu kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Wajib kifayah lebih menekankan pada aspek hukum atau ketentuan kewajiban, sedangkan tanggung jawab kolektif lebih berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab oleh anggota kelompok dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, tanggung jawab kolektif dapat dipahami sebagai kewajiban bersama yang dilaksanakan oleh anggota suatu komunitas secara proporsional sesuai dengan peran dan kemampuannya, guna mencapai tujuan bersama.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki hubungan dengan konteks *habit of mind* budaya sekolah dalam meningkatkan karakter tanggung jawab peserta didik telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu di lingkungan perguruan tinggi dan memiliki relevansi langsung dengan focus penelitian:

1. Haryuni; (2025) “Upaya Sekolah dalam Menanamkan Tanggung Jawab Siswa Melalui Budaya Sekolah” Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana budaya sekolah berperan dalam menanamkan karakter tanggung jawab peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman karakter tanggung jawab dilakukan melalui pembiasaan budaya sekolah, seperti pelaksanaan piket kelas, kedisiplinan waktu, budaya kebersihan, serta kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Guru berperan sebagai teladan utama dalam membentuk sikap tanggung jawab siswa melalui sikap disiplin dan konsistensi dalam menegakkan aturan. Selain itu, kegiatan keagamaan dan pembiasaan moral juga memperkuat kesadaran siswa terhadap tanggung jawab pribadi dan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa budaya sekolah bukan sekadar rutinitas administratif,

melainkan instrumen pendidikan karakter yang efektif apabila diterapkan secara konsisten. Namun, penelitian ini terbatas pada satu konteks sekolah sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan variasi implementasi budaya sekolah di lingkungan pendidikan yang berbeda.

2. A.Ayu; Y.Katminingsih; (2022) “ *Habits of Mind* Sebagai Karakteristik Peserta Didik” penelitian ini menggambarkan bahwa habits of mind berkaitan dengan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, serta pembentukan karakteristik peserta didik, namun penelitian tersebut belum mengkaji implementasi *Habits of mind* dalam konteks budaya sekolah maupun pengaruh terhadap karakter tanggung jawab peserta didik. Selain itu penelitian tersebut lebih menekankan *habits of mind* sebagai karakteristik individual peserta didik yang terbentuk melalui proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika dan kemampuan penalaran. Penelitian belum menjelaskan bagaimana *habits of mind* dapat diinternalisasikan melalui kebiasaan, aturan keteladanan, dan iklim budaya sekolah yang berlangsung secara terus menerus dalam kehidupan sekolah sehari-hari.
3. Sayekti Puji Rahayu; Erny Roesminingsih; Nunuk Hariyati; (2022) “Pembentukan Karakter Budaya Sekolah Di Tingkat Sekolah Dasar” penelitian ini menggambarkan bahwa manajemen budaya sekolah yang dilaksanakan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat membentuk berbagai karakter peserta didik. Namun, penelitian tersebut masih berorientasi pada aspek pengelolaan budaya sekolah dan pembentukan karakter secara umum, tanpa mengkaji *Habit of mind* sebagai budaya berpikir yang diinternalisasikan dalam kehidupan sekolah.
4. Ariemathea dan Katminingsih (2022) “*Habits of Mind* sebagai Karakteristik Peserta Didik” penelitian ini menganalisis berbagai literatur mengenai habits of mind sehingga diperoleh empat karakteristik utama, yaitu pantang menyerah (*persisting*), metakognisi (*thinking about thinking*), kemampuan bertanya dan mengajukan masalah (*questioning and posing problems*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa habits of mind

berperan penting dalam mendukung kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan proses belajar peserta didik. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada kajian konseptual mengenai karakteristik *habits of mind* dan belum mengkaji implementasinya dalam budaya sekolah. Selain itu, penelitian belum menjelaskan bagaimana *habits of mind* dapat menjadi bagian dari budaya sekolah yang berperan dalam meningkatkan karakter tanggung jawab peserta didik.

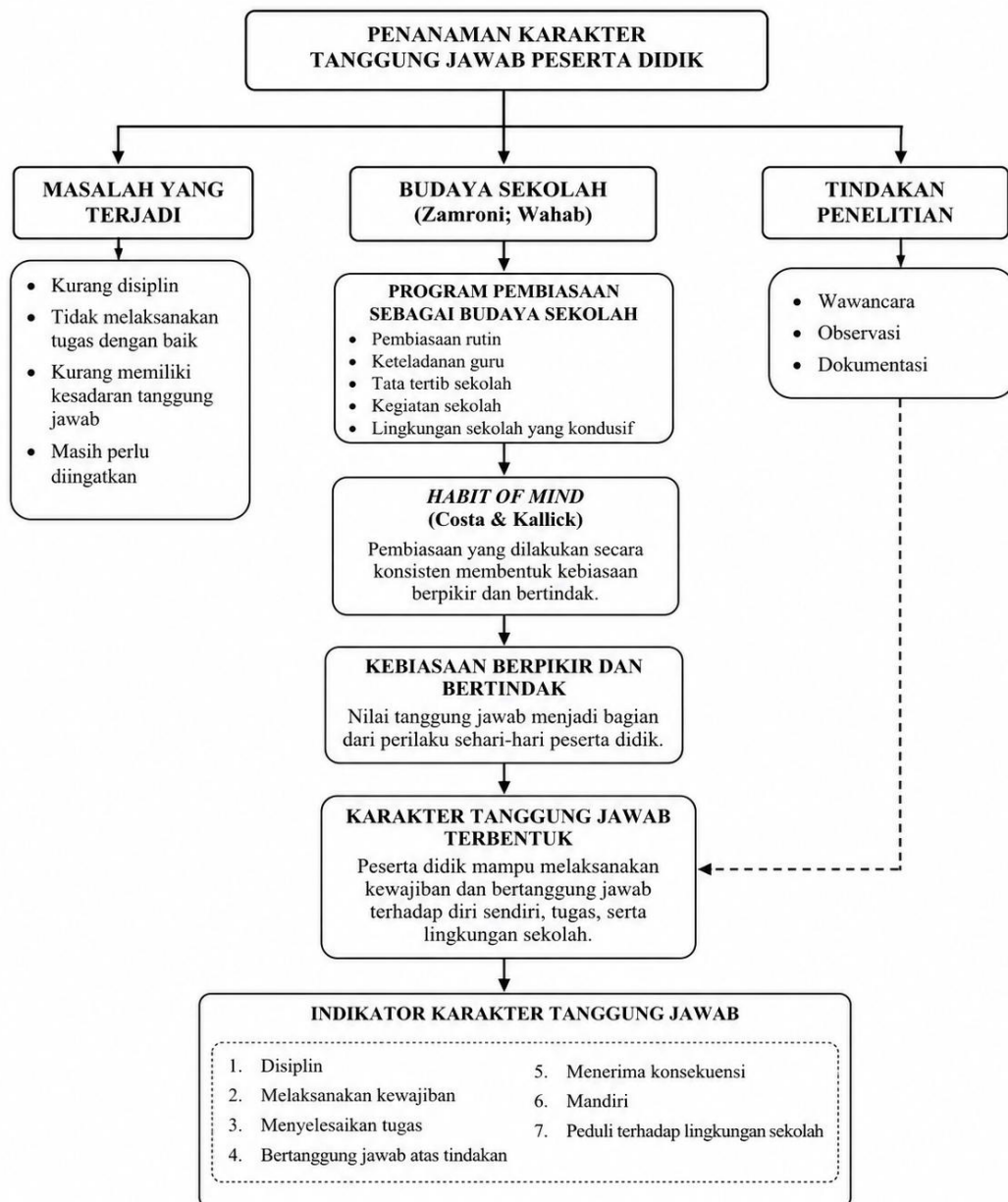
5. Lestari; Rigianti; (2025) “Analisis Kultur Sekolah Terhadap Karakter Siswa di Sekolah Dasar” penelitian ini menganalisis kultur sekolah terhadap karakter siswa di SD Muhammadiyah Wirobrajan 2 Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa kultur sekolah yang dibangun secara positif akan berpengaruh terhadap terbentuknya karakter siswa yang baik. Sebaliknya, kultur sekolah yang kurang baik akan menghasilkan karakter peserta didik yang kurang baik pula. Penelitian ini juga menegaskan bahwa proses Pendidikan merupakan proses pembudayaan sehingga budaya sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa.
6. Rani Juwita (2025) “Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar” penelitian ini menunjukkan bahwa budaya sekolah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik, meskipun pengaruh tersebut juga dipengaruhi oleh factor-faktor lain di luar budaya sekolah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa budaya sekolah perlu terus dikembangkan agar mampu mendukung pembentukan karakter secara optimal.
7. Gestiardi; Suyitno (2021) “Penguatan Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Sekolah Dasar di Era Pandemi” penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan penguatan karakter tanggung jawab peserta didik sekolah dasar selama masa pandemic Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan karakter tanggung jawab dilakukan melalui integrasi nilai tanggung jawab dalam pembelajaran, penerapan protocol Kesehatan, pemberian tugas secara

mandiri, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam mendampingi peserta didik selama belajar dari rumah.

8. Yoyo Zakaria Ansori; Dede Salim Nahdi; Asep Heri Saepuloh; (2021) “Menumbuhkan Karakter Hormat dan Tanggung Jawab Pada Siswa Di Sekolah Dasar” penelitian ini menjelaskan pentingnya karakter hormat dan tanggung jawab sebagai nilai dasar Pendidikan karakter di sekolah dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakter hormat dan tanggung jawab merupakan dua nilai dasar yang harus ditanamkan kepada peserta didik melalui Pendidikan karakter. Nilai-nilai lain seperti kejujuran, disiplin, kerja sama, toleransi, kepedulian, dan keberanian dipandang sebagai nilai pendukung dalam membentuk karakter hormat dan tanggung jawab.
9. Mey R; Handayani; Lutfiana; (2021) “Analisis Implementasi Budaya Sekolah dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik” penelitian ini mendeskripsikan budaya sekolah, implementasi budaya sekolah, kendala, dan solusi dalam membentuk karakter religious peserta didik. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya sekolah diimplementasikan melalui kegiatan harian, mingguan, dan tahunan yang berpedoman pada visi dan misi sekolah. Penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti perbedaan karakteristik peserta didik, lingkungan yang kurang mendukung, dan factor guru, yang diatasi melalui pendekatan individual, komunikasi dengan orang tua, dan penguatan komitmen sekolah.
10. Alifa Hana Almira (2023) “Manajemen Budaya Sekolah dalam Upaya Mengembangkan Karakter Siswa”. Penelitian ini menggambarkan bahwa manajemen budaya sekolah berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik. Pengembangan karakter dipengaruhi oleh kualitas manajemen budaya sekolah yang meliputi perencanaan program, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi budaya sekolah. Budaya sekolah yang dikelola secara efektif mampu membentuk berbagai karakter positif melalui kegiatan pembiasaan, keteladanan, kegiatan rutin, serta kerja sama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Semakin baik manajemen budaya sekolah, maka semakin baik pula perkembangan karakter peserta didik.

F. Kerangka Pemikiran

Konsep kerangka pemikiran merujuk pada gambaran narasi atau proposisi mengenai struktur kognitif yang memandu pendekatan dalam pemecahan masalah, model konseptual bagaimana teori yang ada saling berhubungan dengan beberapa faktor yang ada (Sugiyono, 2026, hlm. 60). Kerangka berpikir kognitif ini memiliki peran krusial menentukan keseluruhan ketepatan proses penelitian, diperlukan penjelasan tegas mengenai asal-usul permasalahan yang diteliti. Maka dari itu, hal ini menjadi acuan yang diperlukan dalam penyajian hasil penelitian. Penelitian yang akan dilakukan meliputi kegiatan meneliti dalam wawancara kepada narasumber secara langsung ke tempat yang bersangkutan, menganalisis mengenai bagaimana upaya sekolah dalam menanamkan karakter Tanggung Jawab pada peserta didik untuk mengetahui bagaimana peran sekolah dalam menanamkan karakter tanggung jawab peserta didik, serta bagaimana bentuk pelaksanaan dan pembiasaan yang diterapkan di SMP Pasundan 3 Bandung. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses penanaman karakter tanggung jawab di sekolah.



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026